

Relasi Kuasa Aktivistis Perempuan Dalam Kasus Pengambilan Keputusan Di Lembaga Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Aulia Febrianti Aci¹, Muhammad Syukur², A. Octamaya Tenri Awaru³

¹ Universitas Negeri Makassar; auliaaulia366@gmail.com

² Universitas Negeri Makassar; m.syukur@unm.ac.id

³ Universitas Negeri Makassar; a.octamaya@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Power Relations ;
Women's Activists;
Decision Making ;

Article history:

Received 2023-09-01

Revised 2023-10-10

Accepted 2023-12-23

ABSTRACT

This type of research is qualitative research and descriptive approach. the number of informants in this study were 8 people who were determined through a purposive sampling technique with the criteria namely 1) student board members at the study program level, 2) female gender. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Checking the validity of the data is done by member check. Data analysis namely data condensation, data model, and drawing conclusions. The results showed that: 1) Forms of Power Relations of Women's Activists in student organizations at the Study Program Level at the Faculty of Social Sciences and Law, Makassar State University, namely a) power relations over the mind, b) power relations over the body, 2) Factors inhibiting Women's Activists in building power relations in student organizations at the Study Program Level at the Faculty of Social Sciences and Law, Makassar State University, namely a) patriarchal culture, b) science, c) women's empowerment

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Aulia Febrianti Aci

Universitas Negeri Makassar;Makassar;Indonesia; auliaaulia366@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci :

Hubungan Kekuasaan
Aktivistis Perempuan
Pengambilan Keputusan

Article history:

Diterima 2023-09-01

Direvisi 2023-10-10

Diterima 2023-12-23

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu 1) pengurus kemahasiswaan tingkat program studi, 2) berjenis kelamin perempuan. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan member check. Analisis data yaitu kondensasi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk Relasi Kekuasaan Aktivistis Perempuan pada Organisasi Mahasiswa Tingkat Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yaitu a) relasi kekuasaan atas pikiran, b) relasi kekuasaan atas pikiran, tubuh, 2) Faktor penghambat Aktivistis Perempuan dalam membangun relasi kekuasaan pada organisasi kemahasiswaan Tingkat Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yaitu a) budaya patriarki, b) ilmu pengetahuan, c) pemberdayaan perempuan

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Penulis Koresponden :*Aulia Febrianti Aci**Universitas Negeri Makassar;Makassar;Indonesia; auliaaulia366@gmail.com*

1. PENDAHULUAN

Konstruksi masyarakat patriarki sering dijadikan “biang kerok” munculnya diskriminasi terhadap perempuan. Oleh kalangan feminis, nilai dan konstruksi ini dijadikan “sasaran tembak” dalam rangka mencapai sasaran untuk membebaskan perempuan. Namun, apakah sebenarnya defenisi masyarakat patriarki itu?

Pada umumnya masyarakat patriarki didefenisikan sebagai tatanan masyarakat yang di mana terjadi dominasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan. Laki-laki dalam defenisi ini bisa bermakna lelaki sebagai kelompok biologis yang berbeda dengan perempuan dan laki-laki yang bermakna “kelelakian” atau sifat maskulinitas. Laki-laki atau “kelelakian” (maskulinitas) diposisikan sebagai biang dari segala diskriminasi terhadap perempuan dan keperempuanan (feminitas). Dalam masyarakat patriarki juga bisa diartikan sebagai konstruksi masyarakat yang menempatkan perempuan di luar dari kodrat keperempuanannya atau masyarakat yang melakukan eksploitsi berlebihan terhadap perempuan dan “keperempuanan”(Prakoso H.A, 2018).

Bukan hanya laki-laki yang kemudian ditempatkan menjadi “biang” tapi perempuan sendiri bisa atau bahkan sering ikut andil dalam proses diskriminasi dan eksploitsi terhadap dirinya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Masyarakat patriarki muncul dalam beragam bentuk, dalam tatanan msyarakat tradisonal, budaya patriarki muncul dalam bingkai tatanan masyarakat feodal yang menempatkan perempuan sebagi masyarakat “kelas dua”. Dalam masyarakat modern (industrial) kuasa patriarki tampil dalam balutan wajah kapitalisme. Dan, dalam masyarakat “religius” dominasi patriarki dilandaskan pada doktrin normatifitas teks yang sangat diskriminatif (Prasetya, F., Sari, A. Y., Delfiyanti, D., & Muliana, M. ,2019).

Mendefinisikan relasi kuasa sebagai sesuatu yang membuat orang patuh. Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan yaitu praktik-praktik kekuasaan dari subjek pada obyek melalui berbagai media dan rupa Kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari cara- cara yang represif, melainkan secara manipulatif dan hegemoni (Sulistya dkk., dalam Ayuningtias, 2019)

Perspektif lembaga kemahasiswaan terkhusus fakultas ilmu sosial dan hukum di universitas negeri Makassar sendiri bahwa perempuan kerap mendapat "lampu sorot"

namun tanpa suara. Mereka seolah-olah dibentuk ke dalam sebuah kepemilikan tunggal dan objek dari wacana dominan. Sebagai perempuan, mereka cenderung mengalami diskriminasi berlapis, baik akibat ketidaksadaran sosial melalui persepsi dan stigma ataupun konstitusi yang maskulin. Hal ini menjadikan perempuan sebagai kelas sosial yang terhegemoni (Hajis, Muh, 2022)

Negara yang menganut sistem patriarki, dimana laki-laki lebih mendominasi perempuan dan perempuan selalu dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki, dalam hal pembagian kerja, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan (Fredik Lambertus Kollo, 2017)

Kekuasaan sering kali diperbincangkan dalam dunia perpolitik. Sebab, dengan memiliki kekuasaan seseorang dapat mengontrol segala sesuatu yang ada dibawah kuasanya. Semakin besar kelompok yang mampu dipengaruhi semakin kuat kekuasaan yang dimiliki. Meskipun begitu, banyak perbedaan pendapat dari para ahli mengenai pengertian kekuasaan (Astutik, 2020).

Sementara itu (Mudhoffir, 2013) menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, diuraikan sebagai berikut

- 1) Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
- 2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
- 3.) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
- 4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
- 5) Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Terhitung 2.974 mahasiswa berjenis kelamin perempuan yang terdaftar semester ganjil 2022 - 2023 Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar (Fakultas Ilmu Social Dan Hukum,2023). Maka dari itu kenapa masih saja dalam proses pengambilan keputusan suara perempuan masih saja kurang memiliki kuasa dalam mengambil sebuah keputusan yang dianggap penting.

Beranjak dari pernyataan diatas menarik untuk dikaji tentang permasalahan bagaimana perempuan yang berada di dalam lembaga kemahasiswaan yang masih lekat budaya patriarkinya dapat membangun relasi kuasa, relasi kuasa apa yang sebenarnya dibangun oleh perempuan di tataran lembaga kemahasiswaan di fakultas ilmu sosial dan hukum universitas

negeri Makassar dan faktor apa yang bisa mendukung perempuan dalam membangun relasi kuasa tersebut. Berangkat dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relasi Kuasa Aktivis Perempuan dalam Kasus Pengambilan Keputusan di Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar”

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Adapun tahap penelitian dalam penelitian ini, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, serta tahap evaluasi dan pelaporan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu 1) pengurus Lembaga kemahasiswaan tingkat program studi, 2) berjenis kelamin perempuan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan *member check*. Analisis data yaitu kondensasi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Relasi Kuasa Pengurus Perempuan Dalam Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Pengambilan keputusan adalah proses dalam menentukan alternatif solusi dari berbagai solusi yang dirumuskan. Sebuah keputusan harus bersifat analitis, fleksibel dan dapat dilaksanakan melalui bantuan sarana dan prasarana yang ada, apa yang menjadi penentu pengambilan keputusan pastinya terjadi karena bentuk relasi kuasa yang dibangun oleh pengurus perempuan, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kekuasaan. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Dari hasil penelitian penulis terdapat dua bentuk relasi kuasa pengurus perempuan berikut pembahasan lebih lengkap dari dua indikator tersebut.

Pertama relasi kuasa atas pikiran, dominasi dan kontrol pikiran merupakan bentuk relasi kuasa yang ditemukan oleh penulis pada penelitian ini. Persamaan pikiran ataupun gagasan pengurus perempuan adalah bentuk karakter yang dimiliki, bentuk persamaan pikiran/gagasan yang dimiliki pengurus perempuan merupakan tanda ataupun bentuk dominasi dan kontrol pikiran. Jadi kesamaan pikiran pengurus perempuan di Lembaga

kemahasiswaan merupakan efek dari wacana yang mendominasi. Dominasi tersebut secara tidak langsung adalah upaya pengontrolan mengenai apa yang baik dan mesti dikonsumsi dan dipikirkan oleh pengurus perempuan di Lembaga kemahasiswaan. Bentuk dominasi dan pengontrolan pikiran pengurus perempuan di Lembaga kemahasiswaan melalui wacana yang diproduksi.

Kedua relasi kuasa atas tubuh, kesamaan perilaku dari pengurus perempuan yang ada di lembaga kemahasiswaan merupakan sebuah turunan relasi kuasa atas pikiran. Artinya kuasa atas pikiran dapat bertransformasi secara praktis (tubuh atau perilaku), jika seorang sudah terjaring relasi kuasa yaitu dikontrol dan didominasi. Sama halnya dengan relasi atas pikiran, bahwa relasi atas tubuh merupakan pengaturan atas tubuh seseorang dengan cara menjabat sebagai pengurus inti. Wacana yang diproduksi di Lembaga kemahasiswaan adalah wacana bahwasanya perempuan dalam organisasi itu hanya bisa ditempatkan di dalam jabatan-jabatan tertentu seperti sekretaris umum dan bendahara umum sudah ditentukan bahwa pengurus perempuanlah yang akan menduduki jabatan tersebut, dengan wacana seperti itulah oleh pengurus perempuan hingga harus menghruskan adanya agenda lain yang lebih produktif, agenda produktif merupakan bentuk kuasa atas tubuh yang ditemukan oleh penulis didalam penelitian ini terdiri dari cara berbicara pengurus perempuan, mengikuti kajian/diskusi dan juga bacaannya serta relasi dengan sesama pengurus maupun senior bahkan masyarakat luar sekalipun.

3.2. Factor Penghambat Pengurus Perempuan Dalam Membangun Relasi Kuasa Di Lembaga Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Pengurus perempuan dalam membangun relasi kuasa pasti memiliki factor penghambat, dengan kata lain yang menjadi penghambat merupakan hal yang ada di lingkup Lembaga kemahasiswaan itu sendiri, dari hasil penelitian penulis terdapat tiga factor penghambat dalam membangun relasi kuasa, berikut pembahasan lebih lengkap dari ketiga factor penghambat tersebut.

Pertama Budaya Patriarki, dominasi kuasa laki-laki yang selalu berjalan bersamaan dengan budaya patriarki, dalam berbagai aspek sebagai wadah ketimpangan gender, tentunya tak terkecuali terjadi di lingkup Lembaga kemahasiswaan di fakultas ilmu sosial dan hukum universitas negeri makassar, adanya budaya patriarki di Lembaga kemahasiswaan menjadi salah satu factor terhambatnya pengurus perempuan dalam membangun relasi kuasa dalam Lembaga kemahasiswaan. Terkait dengan relasi kuasa dalam budaya patriarki, sejatinya menjadi bawaan masyarakat yang hierarki, subordinasian

terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan digambarkan sebagai sebuah budaya patriarki, budaya patriarki merupakan sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki, yang dimaksudkan bahwa patriarki adalah suatu sistem turun temurun yang meletakkan laki-laki dalam posisi tertinggi pada suatu struktur sosial.

Kedua ilmu pengetahuan, dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan menjadi suatu pedoman atau pegangan untuk menyampaikan, membantah serta mempertahankan argumentasi juga tentunya penting dalam hal negosiasi, Ilmu Pengetahuan menjadi salah satu factor terhambatnya pengurus perempuan dalam membangun relasi kuasa, karena tak sedikit dari mereka hanya menganggap Lembaga kemahasiswaan sebagai ajang eksistensi di lingkup kampus tidak melihat bahwa itu merupakan wadah untuk perempuan mengembangkan ilmu pengetahuannya, banyak hal yang bisa dilakukan didalam Lembaga kemahasiswaan terkhusus untuk pengurus perempuan namun tak jarang pengurus perempuan masih ada yang tidak peduli akan hal itu, masih saling mengharap satu sama lain padahal kalau dipikir kalau bukan perempuan yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mereka siapa lagi, tidak mungkin pengurus laki-laki yang akan inisiatif untuk itu dan lebih etisnya pengurus perempuan harus memiliki inisiatif untuk hal-hal yang menyangkut dirinya.

Ketiga Pemberdayaan Perempuan, dalam membangun relasi kuasa pastinya memerlukan wadah pemberdayaan perempuan untuk membangun kepercayaan pengurus lain namun hal ini menjadi salah satu factor penghambat bagi pengurus perempuan dikarenakan masih sangat minim pengurus perempuan dalam melemparkan program-program pemberdayaan perempuan, seperti halnya yang dikemukakan oleh beberapa informan bahwa pemberdayaan perempuan itu sebenarnya sangat penting dihadirkan dalam Lembaga kemahasiswaan karena mampu menjadi wadah untuk pengurus perempuan untuk menambah ilmu pengetahuan maupun relasi mereka, namun bisa dilihat dikondisi sekarang para pengurus perempuan tak sedikit yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan wacana tersebut, kalau bukan pengurus perempuan siapa lagi yang memiliki inisiatif untuk itu, apalagi kita berbicara mengenai diri kita sendiri sebagai perempuan. Pemberdayaan perempuan juga bukan hanya sekedar wadah namun juga merupakan tempat berproses untuk pengurus perempuan di Lembaga kemahasiswaan untuk membentuk relasi kuasa dan yang tentunya dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan relasi yang dimiliki oleh pengurus perempuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat.

1. Bentuk relasi kuasa yang dibangun oleh pengurus perempuan di fakultas ilmu sosial dan hukum univesitas negeri makassar , terlihat dari budaya patriarki yang masih kuat, salah satu bentuk relasi kuasa pengurus perempuan ialah relasi kuasa atas pikiran yang mana Persamaan pikiran ataupun gagasan pengurus perempuan adalah bentuk karakter yang dimiliki, bentuk persamaan pikiran/gagasan yang dimiliki pengurus perempuan merupakan tanda ataupun bentuk dominasi dan kontrol pikiran, pengurus perempuan memiliki daya atau pengaruh yang mendominasi yang dapat membuat pengurus perempuan terlibat langsung dan juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu relasi kuasa atas tubuh menjadi salah satu bentuk relasi kuasa pengurus perempuan yaitu dengan menjabat sebagai pengurus inti , pengurus perempuan yang memiliki cara berbicara, sering mengikuti diskusi/ kajian , juga relasi dengan senior,memiliki relasi yang kuat , juga relasi-relasi yang beragam mampu membuat pengurus perempuan mempunyai ruang gerak yang strategis, dengan kata lain pengurus perempuan dapat lebih mudah mempengaruhi segala bidang yang kaitannya untuk penentu pengambil keputusan.
2. Factor penghambat pengurus perempuan untuk membangun relasi kuasa , salah satunya ialah praktek budaya patriarki yang masih dibiarkan tanpa adanya perlawanan untuk meluruhkan budaya patriarki tersebut, selain itu ilmu pengetahuan yaitu kurangnya wadah untuk mengembangkan diri untuk pengurus perempuan menambah ilmu pengetahuan, selain budaya patriarki dan ilmu pengetahuan , kurang maksimalnya pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu factor terhambatnya pengurus perempuan untuk membangun relasi kuasa yaitu kurangnya inisiatif mereka untuk menyebarluaskan wacana-wacana tentang bagaimana perempuan membangun relasi kuasa dalam lingkup yang masih mempraktekkan budaya patriarki didalamnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtiyas, R. (2019). Relasi Kuasa dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi: Kajian Teori Michel Foucault. *sarasvati*, 1(1), 73-86.
- Anindiya, A., Hidayat, Y., & Apriati, Y. (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km 29, 6

- Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 1(2), 97-106.
- Aprati, Y. (2018). Peran Gender Dalam Kehidupan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- Bungin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif: Komunika, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Hamsah, H., Sidik, S., Mesra, R., & Nur, R. (2023). Tantangan Pendidikan Sosiologi Di Era Industri 4.0. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(03), 131-138.
- Hajis, Muh. 2022. Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Hmps Pendidikan Sosiologi Fis-H Unm. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 105- 123.
- Hayati, F., Zulvira, R., & Gistituati, N. (2021). Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 100-104.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga.
- Indrawan dan Yanawati. 2017. Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen. Pembangunan, dan pendidikan (Revisi). Bandung: PT. Refika Setia.
- Jones, Pip. (2016) Pengantar Teori-Teori Sosial. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia Kollo.
- F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III ISSN, 2598, 5973.
- Kurnianto, E. A. (2017). Relasi Kuasa Tokoh Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Novel Garis Perempuan Karya Sanie B. Kuncoro. *Telaga Bahasa*, 5(2), 243-260.
- Mudhoffir, A. M. (2014). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 75-100.
- Martono, Nanang. (2014). Sosiologi pendidikan Michel Foucault. Jakarta: Rajawali press.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 5975.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Prakoso, H. A. (2018). Relasi Kuasa Perempuan pada Budaya Patrilinealistik Untuk Mengambil Keputusan dalam Lembaga Birokrasi (Studi Kasus Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara).
- Prasetya, F., Sari, A. Y., Delfiyanti, D., & Muliana, M. (2019). Perspektif Budaya patriarki dalam praktik pemberian ASI eksklusif. *Jurnal Keperawatan*, 3(01), 44-47.
- Priyanto, J. P. (2017). Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta; Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault. *Al Qalam*, 34(2), 221-236.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault. *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141-155.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Syahreni, I. I., & Idrus, I. I. Kekerasan Seksual Di Kalangan Aktivis Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar. *Predestination: Journal of Society and Culture*, 3(1), 21-28.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 120-130.
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Sangadji dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian I. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone Kabupaten Flores

- Timur). *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 206-225.
- Wijaya, I. N. (2012). Relasi-relasi Kekuasaan di balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali. *Jurnal Humaniora*, 24(2), 141-155.